



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Persidangan	:	V (Lima)
Rapat ke-	:	Ke – 24
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Sekretaris Jenderal BPK RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Kamis, 22 Juni 2023
Waktu	:	10.24 s.d. 10.54 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua Rapat	:	Dolfie O. F. P. (Wakil Ketua Komisi XI/ F – PDIP)
Sekretaris Rapat	:	Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos. (Kabag Setkom XI)
Acara	:	Pembahasan RKP dan RKA BPK RI Tahun Anggaran 2024
Hadir	:	A. Anggota DPR RI : 23 dari 54 orang Anggota Komisi XI DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang dari 5 orang Pimpinan

1. Dolfie O. F. P. (Wk Ketua/F – PDIP)
2. Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si. (Wk Ketua/F – P. Nasdem)
3. Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes. (Wk. Ketua/F – PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

7 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
2. Marsiaman Saragih
3. Ir. Eriko Sotadurga B. P. S.
4. Masinton Pasaribu, S.H.
5. Dr. H. Musthofa, S.E., M.M.
6. Indah Kurnia
7. Dr. Sihar P. H. Sitorus, BSBA, MBA

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

1 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Puteri Anetta Komaudin, B.Com.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Heri Gunawan, S.E.
2. Susi Marleny Bachsin, S.E., M.M.
3. DR. H. Jefry Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., M.M.
4. R. Imron Amin, S.H., M.H..
5. Bahtra

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Satori, S.Pdl., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Bertu Merlas, S.T.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Ir. Marwan Cik Asan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M.
2. H. Hidayatullah, S.E.
3. H. Ecky Awal Mucharam

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

--

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.

B. Undangan

Sekretaris Jenderal BPK RI (Bahtiar Arif) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F – PDI PERJUANGAN (DOLFIE O.F.P.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan rahayu.

Yang kami hormati Saudara Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan RI beserta jajarannya,

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Menurut laporan dari sekretariat telah hadir 5 fraksi, 8 orang anggota secara fisik, maka menurut ketentuan tata tertib Pasal 279 dan 281 telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu maka RDP ini kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.24 WIB)

Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rencana kerja anggaran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menurut Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 BPK dianggarkan sebesar Rp4.673.975.647.000,00. *Nah*, kita pada kesempatan ini akan mendengarkan penjelasan dari Sekjen terkait apa-apa saja kebutuhan anggaran pada tahun 2024.

Silakan Pak Bahtiar Arif.

SEKJEN BPR RI (BAHTIAR ARIF):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi XI,

Yang terhormat para Anggota Komisi XI DPR RI,

Yang kami hormati Rekan-rekan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Pejabat Eselon I dan Eselon II yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat mengenai rencana kerja dan anggaran BPK Tahun 2024.

Pertama puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa taa'la* kita panjatkan atas karunia rahmat-Nya kita bisa berada di sini untuk menghadiri pembahasan RKA BPK Tahun 2024 dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI atas kesempatan dan berkenan dalam RDP pada hari ini.

Di dalam pemaparan yang akan kami sampaikan, kami akan menyampaikan 3 hal di dalam *slide* berikutnya, yaitu kami akan melaporkan mengenai kinerja BPK selama ini. Kemudian yang kedua kami akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran BPK tahun 2024 setelah penetapan pagu indikatif dan juga yang ketiga kami menyampaikan usulan tambahan anggaran BPK untuk tahun anggaran 2024.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,

Di dalam *slide* kinerja BPK yang pertama, kami melaporkan bahwa pencapaian indikator kinerja utama dalam hal ini tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi target atau di atas target 76% yaitu pencapaiannya 77,48% dan ini didasarkan kepada survei yang telah dilakukan kepada para pemangku kepentingan hasil pemeriksaan BPK.

Kemudian yang kedua juga mengenai indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan BPK dari nilai 4,3 dari skala 5, kami memperoleh 4,31 dari survei yang dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK dan yang terakhir adalah indeks indikator kinerja utama apa berupa nilai *quality assurance* reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi di target 88,22 tercapai 89,26 jadi secara indikator kinerja utama tahun 2022 kami *alhamdulillah* dapat memenuhi.

Kemudian dari realisasi anggaran tahun 2022, kami *alhamdulillah* mencapai 99,66% realisasi anggaran tahun 2022 termasuk di dalamnya ada tambahan anggaran dari apa namanya dari anggaran 3,97 sebelumnya menjadi 4 triliun dan terealisasi 3,99 hampir 100% atau 99,66%, ini capaian tertinggi dalam realisasi anggaran dalam 3 tahun terakhir dan untuk tahun 2023 sampai dengan pertengahan Juni sudah terealisasi 43,85% dari anggaran 4,77 triliun. Jadi kami mendapatkan tambahan anggaran sekitar 400 hampir 500 miliar dari anggaran penetapan anggaran tahun 2023 sehingga anggaran tahun 2023 menjadi 4,7 triliun dan sudah terealisasi 2,092 triliun dan sudah terealisasi *output* pemeriksaan sebanyak 14.000 atau 47,94% dari sisi *output*, dari rencana yang kami tetapkan dan di tahun 2022 *alhamdulillah* juga di nilai kinerja anggaran terbaik untuk pagu sedang, meningkat 2 oleh Kementerian Keuangan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI,

Kami pada *slide* berikutnya melaporkan mengenai kinerja hasil pemeriksaan tentang output laporan hasil pemeriksaan baik Laporan Keuangan LHPLK, LHP kinerja maupun laporan hasil pemeriksaan dengan

tujuan tertentu, total *output*-nya selama 3 tahun 3.665 laporan hasil pemeriksaan dengan rata-rata setiap tahun 1.200 laporan hasil pemeriksaan.

Tahun 2022 ada penurunan dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja dari tahun 2021 di mana tahun 2021 peningkatan LHP kinerja karena ada pemecahan objek pemeriksaan kinerja yang tadinya menjadi jadi satu laporan menjadi dua atau tiga laporan sehingga tahun 2022 kemudian disesuaikan kembali itu menjadi penurunan, menjadi 218.

Kemudian pada *slide* berikutnya, dari sisi kinerja hasil pemeriksaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK dari Semester I 2020 sampai dengan Semester II Tahun 2022 telah ditindaklanjuti sebanyak 81,4% yang sudah sesuai 47%, yang masih dalam proses 34%, yang belum ditindaklanjuti terutama hasil pemeriksaan terakhir di Semester II Tahun 2022 18,5% dan yang tidak dapat ditindaklanjuti 0,1% dengan alasan yang sah.

Kemudian berikutnya, kami melaporkan dampak atas hasil pemeriksaan ini meliputi perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dari kualitas laporan keuangan yang diperiksa BPK oleh pemerintah pusat maupun daerah telah mengalami perbaikan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari kualitas opini yang telah diberikan BPK meningkat. Kemudian terkait dengan hasil pemeriksaan yang memberikan dukungan penegakan hukum untuk kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara dan juga untuk penyelesaian tata kelola pada dana cadangan investasi pemerintah, perbaikan administrasi aset, penyerahan aset, penyetoran ke kas negara dan daerah dan penyelamatan uang negara dan pada *slide* berikutnya, kami melaporkan juga nilai penyerahan aset atau penyetoran kas negara dalam rangka tindak lanjut hasil rekomendasi BPK selama 3 tahun terakhir untuk nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara ini senilai 22,95 triliun, demikian juga koreksi subsidi berdasarkan HPS dan juga koreksi *cost recovery* ini 8,25 untuk koreksi *cost recovery* 7,96. Ini laporan dari hasil tindak lanjut rekomendasi BPK dalam 3 tahun terakhir untuk nilai penjualan aset, koreksi subsidi dan juga koreksi *cost recovery* sebelum dilakukan pembayaran oleh pemerintah kepada operator.

Kemudian pada *slide* berikutnya kinerja BPK. Capaian tata kelola kelembagaan BPK telah menginisiasi pembentukan *engagement group* G20, BPK G20 yaitu SAI 20, kemudian BPK juga mengetuai panel auditor pemeriksaan PBB dan IAEA periode 2022- 2023, memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani di 7 satker dan kami akan terus tingkatkan pada satker yang lain dan penghargaan keterbukaan informasi publik pada 8 satker, kemudian Opini WTP Laporan Keuangan BPK oleh kantor akuntan publik selama 15 kali berturut-turut dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum terbaik pertama kategori lembaga negara dan mendapatkan Anugerah Meritokrasi Tahun 2022 kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit manajemen Aparatur Sipil Negara dan penghargaan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Barang Milik Negara Award serta memperoleh sertifikasi ISO (*Information Security Management System*) dalam teknologi informasi yang ada di BPK.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,

Pada *slide* berikutnya, kami ingin menyampaikan rencana kerja dan awal tahun 2024 dengan memulai pemenuhan usulan anggaran dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari proposal yang kami ajukan dan kemudian penetapan pagu indikatif alokasi anggaran dan pada akhirnya penetapan pagu akhir anggaran BPK dan rata-rata penetapan pagu indikatif dari proposal, ini pada umumnya 80% kecuali di tahun terakhir tahun 2024 kami mengajukan proposal anggaran 7,39. Sangat signifikan kenaikannya dari tahun-tahun sebelumnya mengingat ada tambahan SDM 1.400 tahun 2021 dan juga penambahan jumlah pemeriksaan di kantor pusat maupun kantor perwakilan. Secara umum penambahan SDM tersebut membawa dampak kepada belanja pegawai senilai 400 miliar. Dari 4 triliun paling tidak 4,7 tahun 2023, itu tambahan 400 miliar untuk menambah belanja pegawai dan juga ditambah untuk kebutuhan pemeriksaan serta sarana prasarana dan dukungan lainnya sehingga kami mengajukan 7,39 triliun dan ditetapkan pagu indikatif 467 triliun yang hampir sama dengan anggaran tahun 2023.

Pada *slide* berikutnya, berdasarkan proposal yang diajukan, yang kami ajukan maka ditetapkan pagu indikatif 4,67 triliun dengan perincian program pemeriksaan keuangan negara sebesar 3.890.059.577.000,00 atau 82,56%, kemudian dukungan manajemen sebesar 814.916.070.000,00 atau 17,44% dan dari penetapan pagu indikatif ini, kami mengajukan usulan pergeseran untuk menambah program pemeriksaan keuangan negara. Dari 3,859 triliun kami mengusulkan untuk menambah program pemeriksaan keuangan negara sehingga menjadi 3.954.847.502.000,00 atau menjadi 84,61% dari total pagu indikatif BPK, dan dengan demikian program dukungan manajemen turun menjadi 719.128.145.000,00 atau persentase menjadi 15,39 dari total pagu indikatif BPK.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,

Dari pagu indikatif 4,67 triliun tersebut, rincian per jenis belanja dapat kami laporkan belanja operasional mendapatkan alokasi 3.001.000.000.000,00 atau 64,22% dan belanja nonoperasional 953 miliar atau 20,390%. Di dalamnya terdapat belanja untuk kegiatan perjalanan melaksanakan pemeriksaan atau belanja pemeriksaan sebesar 669 miliar atau 14,32% dari total penetapan pagu indikatif. Untuk dukungan manajemen terdiri dari belanja operasional 491 miliar atau 10,51% dan belanja nonoperasional sebesar 228 miliar atau 4,88%, ini kalau dilihat dari per jenis belanja.

Kemudian dari program pemeriksaan keuangan negara senilai 3,95 miliar tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, ini sebesar 3,81 miliar atau 96,44%, kemudian untuk meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan, untuk mendukung pemeriksaan sebesar 22,92 miliar atau 0,58%, meningkatkan efektivitas pengawasan untuk kualitas pemeriksaan 20,21 miliar atau 0,51%, mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan, ini 83,52 miliar atau 2,11% dan

menguatkan regulasi aspek hukum pemeriksaan serta penyelesaian ganti kerugian sebesar 14,19% atau 0,36%.

Kemudian pada *slide* berikutnya, alokasi untuk dukungan manajemen senilai 719,13 miliar, ini akan dialokasikan untuk meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan, ini 45,86 miliar atau 6,38%, meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM berbasis sistem merit senilai 45,94%, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 17,54% atau 17,54 miliar atau 2,44%, meningkatkan sarana prasarana untuk mewujudkan *smart* dan *eco office* 151,81 miliar atau 21,11% dan meningkatnya fungsi monitoring atas implementasi kebijakan 68,77 miliar atau 9,6%, terwujudnya perilaku kerja, kerja berbasis sistem informasi 95,15% atau 13,23% dan membangun kemitraan dengan organisasi internasional 9,66 miliar atau 1,34%.

Selanjutnya yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, kami mengusulkan tambahan anggaran senilai 2,71 triliun didasarkan kepada kebutuhan anggaran yang kami sampaikan pada proposal sebesar 7,38 triliun dengan berdasarkan penetapan pagu indikatif 4,67 triliun sehingga kami masih mengajukan kebutuhan untuk tambahan anggaran program pemeriksaan 1,89 triliun dan dukungan manajemen 814 miliar.

Pada saat berikutnya kami menyampaikan rincian dari program pemeriksaan keuangan negara dalam usulan tambahan anggaran untuk program pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau 94,80% dari usulan tambahan anggaran, ini digunakan untuk pemeriksaan-pemeriksaan yaitu penambahan *sample* pemeriksaan, pemeriksaan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan emisi karbon, pemeriksaan tematik lokal di masing-masing kementerian dan daerah, pemeriksaan atas program terkait reformasi birokrasi, pemeriksaan lanjutan prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah di bidang ekonomi, pengembangan wilayah, SDM, revolusi mental, infrastruktur dan polhukam dan pemeriksaan *sustainable development goals* dan portofolio. Totalnya pemeriksaan-pemeriksaan tersebut adalah 450,72 miliar dan pemanfaatan *big data* analitik meningkatkan peran BPK dalam strategi nasional pemberantasan korupsi, ini 104,73 miliar dan pemenuhan sarana prasarana pemeriksaan di empat perwakilan baru di 4 provinsi baru. Ini senilai ya 1,23 triliun untuk 4 provinsi baru, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar membentuk perwakilan setiap provinsi sehingga dengan 4 provinsi itu kami sudah mengalokasikan di dalam tambahan anggaran ini.

Dan kemudian untuk pengawasan Inspektorat sebesar 5,26 miliar, untuk pendidikan dan pelatihan sebesar 77,17 miliar pada *slide* berikutnya, untuk pembinaan, pengembangan dan bantuan hukum pemeriksaan kerugian keuangan negara 4,68 miliar dan perencanaan analisis kebijakan evaluasi pemeriksaan keuangan negara 11,13 miliar. Ini untuk program pemeriksaan keuangan negara totalnya tambahan anggaran yang kami usulkan 1,89 triliun. Dan untuk program dukungan manajemen kami mengajukan usulan tambahan senilai 814,47 miliar, ini untuk peningkatan kualitas pelayanan dukungan pemeriksaan, komunikasi hubungan dan kerja sama antarlembaga, pengembangan mekanisme kompensasi pegawai berbasis kinerja individu,

pengelolaan sarana prasarana menuju *eco office* dan *smart office*, penyelesaian *digital enterprise* arsitektur BPK, peningkatan peran BPK dunia internasional dan juga untuk pemenuhan sarpras pendukung pemeriksaan.

Demikian Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat, kami mohon dukungan dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran BPK sesuai pagu indikatif tahun 2024, yang kedua kami mohon dukungan dan persetujuan mengenai pergeseran anggaran antar program BPK tahun 2024 dan yang ketiga atas usulan tambahan anggaran BPK Tahun 2024.

Terima kasih, sekali lagi mohon dukungan.

*Wabillahitaufiq walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih Pak Bahtiar.

Demikianlah Bapak-Ibu Anggota, penjelasan dari Sekjen BPK RI terkait dengan kebutuhan anggaran BPK tahun 2024 yang semula 4,6 triliun kemudian menjadi 7,386 triliun usulan tambahan. Kalau Bapak-Ibu Anggota setuju, ini saya mau mengusulkan. Jadi walaupun kita bahas dengan Sekjen BPK RI sekarang, ada koreksi merubah arah kebijakan, Pak Sekjen ini *enggak* bisa ngambil keputusan, dia akan tanya dulu sama Anggota BPK. Ini mau ada perubahan seperti ini, nanti datang lagi ke kita. Daripada *tektok* seperti itu, hari ini kita terima, tapi pembahasan dan penjelasan lebih lanjut akan dilakukan melalui Rapat Konsultasi BPK dengan Komisi XI sebelum tanggal 14 Juli. Hasil pembahasan itu akan kita sampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Jadi kita menjalankan amanat Undang-Undang BPK Pasal 35 juga, jadi kita *enggak* usah berpanjang lebar, kita pelajari dokumennya, *nah* kita bisa baca rancangan kesimpulan RDP kita untuk hari ini. Coba ditampilkan langsung.

Pak Sekjen setuju ya? Iya baik.

Rancangan kesimpulan, rancangan kesimpulan.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PPP (Dr. AMIR USKARA, M. Kes):

Pak Sekjen sudah setuju, selesai.

KETUA RAPAT:

Rancangan kesimpulan, sudah, tadi sudah rapat, sudah, sudah, sudah, sudah.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PPP (Dr. AMIR USKARA, M. Kes):

Pak Hatari itu partai koalisi.

KETUA RAPAT:

Sudah, sudah. sudah oke. Sudah, sudah.

Rancangan Kesimpulan RDP Komisi XI DPR RI bersama Sekjen BPK RI
Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah, Rancangan Kerja BPK RI dan
Rencana Kerja Pagu Indikatif BPK RI pada Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024
Rabu, 21 Juni 2023

Komisi XI DPR RI bersama Kepala Sekjen BPK RI menyepakati hal-hal sebagai berikut;

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Sekjen BPK RI tentang rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran pagu indikatif BPK RI Tahun 2024.
2. Pagu indikatif BPK RI sebagai usulan awal dalam pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan belanja negara Tahun Anggaran 2024 setelah usulan pergeseran sebesar 4.673.975.647.000,00 dengan rincian per program dan fungsi sebagai berikut, sebagaimana di tabel dianggap sudah dibacakan.
3. Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pagu indikatif BPK RI dalam pembicaraan pendahuluan.
Bukan menyetujui ini ya.

WAKIL KETUA KOMISI XI/F – PPP (Dr. AMIR USKARA, M. Kes):

Belum, belum. Memahami.

KETUA RAPAT:

Memahami saja dulu, usulan tambahan untuk diusulkan dalam RAPBN Tahun 2024 dan akan disesuaikan dengan ruang fiskal RAPBN Tahun 2024.

4. Penjelasan dan pembahasan lebih lanjut atas kebutuhan anggaran BPK RI tersebut di atas akan dilakukan dalam Rapat Konsultasi BPK RI dengan Komisi XI DPR RI sebelum tanggal 14 Juli 2023.
5. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud butir 4 di atas, akan disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2024.

Dari Bapak-Ibu Anggota ada tambahan koreksi?

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):

Ada, yang ketiga ya. Saya kira tiga ini kan hubungannya nanti dengan empat.

KETUA RAPAT:

Iya.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):

Jadi sebetulnya untuk diusulkan ini jangan dulu, jadi 8 ini dan akan disambungkan ke yang poin empat, akan dilakukan dalam Rapat Konsultasi ini, jadi.

KETUA RAPAT:

Tadi karena sudah disampaikan Pak Andreas, kita bahasanya memahami saja dulu, belum menyetujui.

F – PDI PERJUANGAN (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM.):

Sesuai dengan Pasal 35, itu kan sebetulnya BPK mengajukan kepada DPR, jadi seperti pagu indikatif ini kan itu kebiasaan lama itu waktu itu dibicarakan. Harusnya di sini dulu begitu *loh*, harusnya di sini dulu, baru kemudian kita mengajukan kepada, menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

KETUA RAPAT:

Jadi yang nomor 3 untuk diusulkan yang anak kalimat di bawah, untuk diusulkannya dihapus dulu. Jadi, *eh* bukan. Kata-kata untuk diusulkannya saja yang dihapuskan, kan di atas sudah memahami usulan, untuk dalam, itu saja, begitu saja bahwa kita sudah tahu bahwa ada permintaan usulan tambahan tapi kita belum ada kata-kata persetujuan, itu saja.

Ada lagi Bapak-Ibu? Dari Pak Sekjen? Cukup? Kita bisa sepakati? sepakat ya?

(RAPAT : SETUJU)

Mungkin ada *closing statement* Pak Sekjen sebelum kita tutup RDP-nya.

F – P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Sebentar Pak Sekjen, Pak Sekjen sebentar, *enggak* ada masalah. Ini pembahasan RKA BPK ini yang terkilat dari semua yang kami bahas, jadi apresiasi. Hanya saya mau tanya sama Pak Sekjen, bagaimana kasus yang ada di Ternate, bagaimana itu? Anggota BPK sendiri yang terima gratifikasi di BPK Perwakilan Maluku Utara.

Yang kedua Pak Sekjen, kok ini ada poin yang tidak ditindaklanjuti pada halaman 9 itu, *eh* halaman berapa tadi? Pak Sekjen 15 kali WTP atau

setara 15 tahun, halaman 9. Itu saja Pak Sekjen. Satu tadi itu tidak di, tidak ditindaklanjuti, ya. Jadi udah mantap Pak Sekjen.

Tambahan satu pagu indikatif harus ditaruh *footnote* di bawah ini. Surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, harus ditaruh di bawah ini, itu, supaya sama dengan ke kementerian/lembaga lainnya.

Terima kasih Pimpinan rapat.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hatari.

Nanti Pak Sekjen pada saat pertemuan penjelasan dan konsultasi, apa yang menjadi atensi Pak Hatari agar disiapkan jawabannya. Silakan *closing statement*-nya Pak Sekjen.

SEKJEN BPR RI (BAHTIAR ARIF):

Baik terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,

Pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas hasil RDP pada pagi hari ini dan terkait dengan persetujuan pagu indikatif yang telah ditetapkan dan juga memahami usulan tambahan anggaran BPK Tahun 2024 dan juga rencana putusan mengenai pelaksanaan Rapat Konsultasi sebelum 14 Juli tahun 2024 dan kami akan segera menindaklanjuti untuk pelaksanaan rapat konsultasi antara Komisi XI DPR RI dan BPK RI sebelum 14 Juli, dan sekali lagi kami atas nama Sekretariat Jenderal BPK RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas hasil ini. Dan untuk yang disampaikan Pak Hatari akan kami siapkan untuk pada saat pertemuan konsultasi.

Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih, mohon maaf kami akhiri.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om santi, santi om.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi XI, kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf apabila dalam RDP ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap syukur atas rahmat dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, maka RDP ini kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 10.54 WIB)

Jakarta, 22 Juni 2023

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,
Ttd

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.

NIP. 197106131998032003